

## ***Ethos, Pathos, dan Logos dalam Pidato Muhammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno di Sidang BPUPKI 1945***

**Sujie Pratama<sup>1\*</sup>, Sahru Lexa Alfa Rizki<sup>2</sup>, Muhamad Anugrah Pratama<sup>3</sup>, Iksan Ahmad<sup>4</sup>**

<sup>1-4</sup>Ilmu Komunikasi, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

\*Penulis Korespondensi: [sujiepratamand@gmail.com](mailto:sujiepratamand@gmail.com)

**Abstract.** *The first session of BPUPKI featured speeches by Muhammad Yamin, Soepomo, and Soekarno on the foundation of an independent Indonesian state. This study aims to compare the textual use of Ethos, Pathos, and Logos in their speeches. Using a descriptive qualitative method and Aristotle's rhetorical theory, the data were drawn from the Proceedings of the BPUPKI and PPKI Sessions and relevant supporting literature, then examined through qualitative content analysis. The analysis indicates that Muhammad Yamin's text constructs Ethos through national representation and intellectual references, Pathos through depictions of suffering, sacrifice, and hope, and Logos through historical and causal reasoning. Soepomo's text emphasizes Ethos through knowledge of state theory and Indonesian social conditions, Pathos through unity, kinship, and mutual cooperation, and Logos through systematic reasoning and theoretical comparison. Soekarno's text combines Ethos through his positioning in the forum and collective representation, Pathos through repetition and appeals to unity, and Logos through theoretical synthesis, analogy, and conceptual reduction. These findings describe rhetorical strategies present in the texts; they do not establish the actual emotional responses or persuasive effects experienced by session participants.*

**Keywords:** *BPUPKI; Ethos; Logos; Pathos; Rhetoric.*

**Abstrak.** Sidang pertama BPUPKI menjadi forum penting bagi Muhammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno dalam menyampaikan gagasan mengenai dasar negara Indonesia. Penelitian ini bertujuan membandingkan penggunaan *Ethos*, *Pathos*, dan *Logos* dalam teks pidato ketiga tokoh tersebut. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teori retorika Aristoteles. Data bersumber dari Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI serta literatur pendukung, kemudian dianalisis menggunakan analisis isi kualitatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa teks pidato Muhammad Yamin membangun *Ethos* melalui representasi kebangsaan dan rujukan intelektual, *Pathos* melalui gambaran penderitaan, pengorbanan, dan harapan, serta *Logos* melalui penalaran historis dan sebab-akibat. Teks Soepomo menekankan *Ethos* melalui penguasaan teori negara dan pemahaman kondisi sosial Indonesia, *Pathos* melalui persatuan, kekeluargaan, dan gotong royong, serta *Logos* melalui penalaran sistematis dan perbandingan teori. Teks Soekarno memadukan *Ethos* melalui penempatan diri dalam forum dan representasi kolektif, *Pathos* melalui pengulangan dan seruan persatuan, serta *Logos* melalui sintesis teori, analogi, dan penyederhanaan konsep. Temuan ini menjelaskan strategi retorika yang tercermin dalam teks, bukan respons aktual atau dampak persuasi terhadap peserta sidang.

**Kata Kunci:** *BPUPKI; Ethos; Logos; Pathos; Retorika.*

### **1. LATAR BELAKANG**

Sidang pertama Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada 29 Mei–1 Juni 1945 menjadi forum penting dalam perumusan dasar negara Indonesia merdeka. Muhammad Yamin menyampaikan pidato pada 29 Mei, Soepomo pada 31 Mei, dan Soekarno pada 1 Juni 1945. Yamin mengemukakan gagasan yang bertumpu pada peradaban bangsa sendiri, Soepomo menawarkan konsep negara integralistik, sedangkan Soekarno menyampaikan lima prinsip yang kemudian dikenal sebagai Pancasila (Fatma, 2020). Ketiganya berbicara dalam forum historis yang sama, tetapi menggunakan penekanan argumentasi yang berbeda. Perbedaan tersebut dapat ditelaah sebagai strategi retorika dalam komunikasi politik (Sujoko et al., 2021). Kajian terhadap pidato dalam sidang BPUPKI juga

perlu memperhatikan sumber historis yang digunakan, terutama berkaitan dengan teks pidato Muhammad Yamin. Hardianto (2017) menunjukkan adanya persoalan autentisitas *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945* karya Muhammad Yamin, yang diklaim sebagai salinan kata demi kata dari notulen sidang, tetapi disusun berdasarkan sumber yang berbeda dari Koleksi Pringgogidgo. Oleh karena itu, analisis pidato perlu didasarkan pada sumber yang dapat dipertanggungjawabkan, seperti *Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI* yang diterbitkan Sekretariat Negara serta sumber arsip pembandingan dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Strategi persuasi dalam pidato ketiga tokoh tersebut dapat dianalisis menggunakan teori retorika Aristoteles, yang mencakup tiga unsur utama, yaitu *Ethos*, *Pathos*, dan *Logos*. Sejumlah penelitian terdahulu telah menggunakan pendekatan tersebut untuk mengkaji pidato tokoh publik. Aditiya et al., (2024), misalnya, menganalisis retorika Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam sidang Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa terkait konflik Palestina dan Israel. Ardila & Febria (2025) mengkaji penggunaan *Ethos*, *Pathos*, dan *Logos* dalam pidato Dedi Mulyadi pada peringatan Hari Kebangkitan Nasional.

Sementara itu, Fahrudin et al., (2022) menganalisis retorika pidato Presiden Joko Widodo di Ibu Kota Nusantara. Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa teori retorika Aristoteles dapat digunakan untuk memahami strategi penyampaian pesan dan persuasi dalam pidato tokoh publik. Meskipun penelitian terdahulu telah mengkaji retorika pidato tokoh publik, kajian-kajian tersebut berfokus pada konteks kontemporer dan belum secara khusus membandingkan *Ethos*, *Pathos*, dan *Logos* dalam pidato Yamin, Soepomo, dan Soekarno pada forum BPUPKI yang sama. Kajian historis mengenai pidato Soekarno, seperti Sujoko et al. (2021), membantu menjelaskan pembentukan identitas keindonesiaan dalam pidato 1 Juni 1945, tetapi tidak menjadi perbandingan sistematis atas tiga unsur retorika pada ketiga tokoh. Selain itu, persoalan autentisitas teks Yamin membuat penelusuran versi sumber menjadi bagian penting dari analisis. Kebaruan penelitian ini terletak pada perbandingan penggunaan *Ethos*, *Pathos*, dan *Logos* dalam teks pidato Muhammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno pada sidang pertama BPUPKI. Penelitian tidak hanya mengidentifikasi ketiga unsur retorika pada setiap teks, tetapi juga membandingkan kecenderungan strategi argumentasi yang ditampilkan. Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah menjelaskan bagaimana kredibilitas pembicara dibangun dalam teks, bagaimana bahasa pidato berpotensi membangkitkan emosi, dan bagaimana argumen disusun secara rasional, serta menguraikan persamaan dan perbedaan di antara ketiga tokoh.

## 2. KAJIAN TEORITIS

### Retorika

Retorika pada dasarnya adalah seni berkomunikasi secara persuasif untuk memengaruhi cara berpikir dan bertindak audiens. Aristoteles memaknainya sebagai kemampuan memilih dan menggunakan bahasa secara tepat sesuai situasi agar pesan meyakinkan. Untuk itu ia mengemukakan tiga bukti artistik, yaitu *Ethos*, *Pathos*, dan *Logos*, yang sering digambarkan sebagai segitiga retorika (*rhetorical triangle*) dan masih menjadi rujukan utama dalam analisis retorika modern. Meskipun lahir pada masa Yunani Kuno, kerangka ini tetap dipakai untuk memahami persuasi dalam komunikasi politik, sosial, dan keagamaan masa kini. *Ethos* berkaitan dengan siapa yang berbicara, apakah pembicara layak dipercaya. Audiens menilai pesan tidak hanya dari isinya, tetapi juga dari karakter, kredibilitas, dan integritas orang yang menyampaikannya. Kepercayaan ini dibangun melalui karakter yang baik, kecerdasan, dan niat baik yang tampak dalam cara pembicara bertutur, serta melalui kompetensi dan kelayakan yang dimilikinya. Karena itu, pembicara yang jujur dan konsisten antara ucapan dan perbuatannya akan lebih mudah diterima. Seorang pemimpin yang menegaskan pentingnya integritas dan keteladanan pejabat demi pemerintahan yang bersih, misalnya, sedang membangun *Ethos* di hadapan publik. *Pathos* berkaitan dengan perasaan audiens. Pembicara yang mampu membangkitkan dan mengelola emosi pendengar akan membuat pesannya diterima secara afektif dan menumbuhkan keterlibatan emosional.

Aristoteles memandang emosi sebagai hal yang memengaruhi penilaian: orang menilai dengan cara berbeda ketika mereka sedang gembira, sedih, marah, atau takut. Rasa bangga terhadap demokrasi bangsa dan dorongan untuk berani menghadapi tantangan merupakan contoh emosi yang lazim digugah dalam pidato kenegaraan.. Namun, daya tarik emosional perlu proporsional, sebab *Pathos* yang berlebihan tanpa dukungan data justru membuat audiens skeptis. *Logos* berkaitan dengan nalar di balik pesan. Pembicara meyakinkan audiens melalui argumen yang logis, penalaran yang runtut, serta bukti atau data yang mendukung gagasannya. Bukti logis ini mencakup argumen dan rasionalisasi yang disusun pembicara, dan sering diperkuat dengan fakta serta angka. Bentuk *Logos* yang khas adalah entimem, yaitu penalaran yang berangkat dari premis yang lazim diterima, dan contoh konkret yang memperjelas argumen. Dalam komunikasi pemerintah, *Logos* efektif bila data disajikan dengan bahasa yang mudah dipahami dan tidak terlalu teknis, sehingga tidak menimbulkan jarak dengan masyarakat. *Ethos*, *Pathos*, dan *Logos* saling melengkapi dalam suatu pidato. Untuk kebutuhan analisis, *Ethos* dioperasionalkan sebagai bagian teks yang menampilkan kredibilitas, pengetahuan, karakter, atau posisi pembicara; *Pathos* sebagai pilihan kata, gambaran, atau

pengulangan yang berpotensi mengarahkan emosi audiens; dan *Logos* sebagai alasan, bukti, perbandingan, hubungan sebab-akibat, atau susunan premis-kesimpulan. Apabila satu kutipan mengandung lebih dari satu unsur, kutipan diklasifikasikan menurut fungsi retorik yang paling dominan dalam konteks paragraf. Unsur lain dicatat sebagai fungsi sekunder dalam proses interpretasi. Karena penelitian ini menganalisis dokumen, penetapan *Pathos* menunjukkan potensi daya emosional teks, bukan bukti bahwa audiens benar-benar mengalami emosi tertentu (Pramudita et al., 2025).

### **Penelitian Terdahulu**

Penelitian mengenai retorika tokoh publik telah dilakukan dengan menggunakan pendekatan *Ethos*, *Pathos*, dan *Logos* maupun konsep retorika lainnya. Aditiya et al., (2024) mengkaji penggunaan *Ethos*, *Pathos*, dan *Logos* dalam pidato Menteri Luar Negeri Retno Marsudi pada sidang Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa terkait konflik Palestina dan Israel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Ethos* tercermin melalui karakter dan kredibilitas pembicara, *Pathos* melalui ungkapan empati dan penegasan yang membangun kedekatan emosional dengan audiens, sedangkan *Logos* terlihat dalam argumentasi yang didukung fakta mengenai korban konflik. Penelitian tersebut memperlihatkan bagaimana ketiga unsur retorika dapat digunakan untuk menganalisis persuasi dalam pidato diplomatik. Ardila & Febria (2025) menganalisis retorika dalam pidato Dedi Mulyadi pada upacara Hari Kebangkitan Nasional yang mengusung tema “Bangkit Bersama Wujudkan Indonesia Kuat”. Penelitian tersebut menemukan tiga data *Ethos*, lima data *Pathos*, dan lima data *Logos*. Temuan ini menunjukkan bahwa unsur kredibilitas pembicara, keterlibatan emosional, dan penalaran dapat diidentifikasi secara bersamaan dalam satu pidato. Kajian ini relevan karena menggunakan kerangka teori yang juga diterapkan dalam penelitian mengenai pidato para tokoh BPUPKI. Selanjutnya, Fahrudin et al., (2022) melalui penelitian berjudul “Analisis Retorika Pidato Presiden Jokowi di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Kanal YouTube Official iNews” mengkaji penggunaan retorika dalam pidato Presiden Joko Widodo. Hasil penelitian mengidentifikasi retorika deliberatif yang berorientasi pada masa depan dan ditandai oleh penggunaan ajakan serta larangan. Penelitian tersebut juga mengidentifikasi penggunaan unsur *Ethos*, *Pathos*, dan *Logos* dalam pidato yang dianalisis. Kajian ini memberikan acuan mengenai penerapan analisis retorika pada pidato kenegaraan. Selain kajian retorika pidato tokoh publik, penelitian mengenai pemikiran Soepomo dan konsep negara integralistik juga menjadi konteks yang relevan untuk memahami isi gagasan dalam sidang BPUPKI. Namun, berdasarkan kajian yang dirujuk dalam penelitian ini, pembahasan mengenai Soepomo lebih banyak menitikberatkan pada substansi gagasan negara integralistik, termasuk akar filosofis dan

implikasinya, daripada cara gagasan tersebut disampaikan untuk membujuk audiens. Secara keseluruhan, penelitian terdahulu memberikan landasan untuk menggunakan teori retorika dalam menganalisis pidato, tetapi belum secara khusus membandingkan strategi persuasi Muhammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno dalam satu forum historis yang sama. Penelitian ini mengisi ruang tersebut dengan menganalisis ketiga unsur retorika pada masing-masing pidato, kemudian membandingkan kecenderungan penggunaannya. Dengan demikian, fokus penelitian bukan hanya pada isi gagasan dasar negara, tetapi juga pada cara ketiga tokoh membangun kredibilitas, melibatkan emosi audiens, dan menyusun argumentasi dalam menyampaikan gagasannya.

### 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode kualitatif deskriptif dan pendekatan analisis retorika. Metode kualitatif deskriptif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemahaman dan penggambaran fenomena (Yuliani, 2018). Nasruji (2018) menyampaikan bahwa metode penelitian kualitatif deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung pada masa sekarang ataupun pada masa yang lampau. Sedangkan pendekatan analisis retorika digunakan untuk melihat bagaimana gagasan yang disampaikan oleh Muhammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno disampaikan kepada peserta sidang (Savira & Sitinjak, 2024). Objek penelitian ini berupa teks pidato dari Muhammad Yamin pada 29 Mei 1945, Soepomo pada 31 Mei 1945, dan Soekarno pada 1 Juni 1945 yang dianalisis menggunakan teori retorika Aristoteles dengan berfokus pada tiga unsur persuasi yaitu *Ethos*, *Pathos*, dan *Logos* (Huri, 2023).

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer merupakan sumber yang diperoleh langsung dari sumbernya, sedangkan data sekunder merupakan sumber pendukung yang diperoleh melalui literatur atau publikasi pihak lain (Sugiyono, 2022). Data primer berupa teks pidato Muhammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno dalam Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI terbitan Sekretariat Negara Tahun 1959. Risalah dipilih karena memuat dokumentasi tekstual mengenai pidato dan jalannya persidangan, sehingga memungkinkan analisis terhadap cara ketiga tokoh membangun *Ethos*, *Pathos*, dan *Logos*. Teks tersebut dibandingkan dengan sumber arsip dalam Naskah Sumber Arsip Dasar Negara I: Masa Sidang Pertama BPUPK 29 Mei s.d. 1 Juni 1945 terbitan BPIP-ANRI tahun 2024. Perbandingan dilakukan untuk memeriksa kesesuaian pokok argumentasi dan mengidentifikasi perbedaan tekstual yang berpotensi memengaruhi interpretasi retorika. Temuan dari perbandingan digunakan sebagai pertimbangan dalam menetapkan batas analisis, khususnya pada pidato

Muhammad Yamin yang memiliki persoalan kesesuaian antara versi terbitan tahun 1959 dan catatan arsip. Analisis *Ethos, Pathos, dan Logos* tetap dilakukan terhadap teks yang secara eksplisit ditetapkan sebagai sumber analisis utama. Data dikumpulkan dengan teknik dokumentasi, yaitu menghimpun data dari catatan, transkrip, buku, dan dokumen lain yang relevan dengan objek penelitian (Sugiyono, 2022). Peneliti mengumpulkan risalah sidang dan arsip pembandingan, lalu menelusuri literatur sekunder melalui basis data jurnal, repositori akademik, dan perpustakaan dengan kata kunci seperti "retorika", "*Ethos, Pathos, Logos*", dan "pidato BPUPKI". Dokumen diseleksi berdasarkan relevansinya dengan pidato Muhammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno pada 29 Mei-1 Juni 1945. Bagian pidato yang relevan dicatat dalam kartu data yang memuat nama pembicara, tanggal, halaman, dan kutipan. Terakhir, dilakukan kritik sumber dengan membandingkan teks risalah dengan arsip pembandingan untuk menilai keterandalan data sebelum dianalisis berdasarkan kategori *Ethos, Pathos, dan Logos*. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi kualitatif, yaitu teknik yang digunakan untuk menafsirkan makna dari teks secara sistematis dengan mengklasifikasikan data ke dalam kategori-kategori tertentu berdasarkan konteksnya (Sitasari, 2022).

Analisis isi kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk tidak sekadar mengidentifikasi kemunculan kata atau kalimat, tetapi juga memaknai bagaimana strategi retorika *Ethos, Pathos, dan Logos* dibangun dalam konteks historis dan sosial pidato ketiga tokoh tersebut. Proses analisis dilakukan dengan membaca dan menandai bagian pidato Muhammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno yang menunjukkan indikator *Ethos* (kredibilitas dan karakter pembicara), *Pathos* (daya tarik emosional terhadap audiens), dan *Logos* (argumen logis dan rasional), kemudian data yang telah dikategorikan tersebut diinterpretasikan berdasarkan kerangka teori retorika Aristoteles. Keabsahan data dalam penelitian ini diperiksa menggunakan teknik triangulasi sumber. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan dan mengecek data yang diperoleh dari berbagai sumber untuk memastikan keabsahan data penelitian (Mekarisce, 2020). Dalam penelitian ini, triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang terdapat dalam Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI, catatan sejarah, serta dokumen atau jurnal yang relevan dengan penelitian. Perbandingan tersebut dilakukan untuk melihat kesesuaian informasi dan memastikan bahwa data yang digunakan memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### ***Ethos***

Pidato Muhammad Yamin pada 29 Mei 1945, Soepomo pada 31 Mei 1945, dan Soekarno pada 1 Juni 1945 menyampaikan pemikiran mengenai dasar negara Indonesia menjelang kemerdekaan. Dalam perspektif retorika Aristoteles, *Ethos* berkaitan dengan karakter dan kredibilitas pembicara dalam membangun kepercayaan audiens. Kredibilitas tersebut tidak hanya bersumber dari kedudukan atau identitas pembicara, tetapi juga dari cara ia menunjukkan pengetahuan, pemahaman terhadap persoalan, dasar pemikiran yang relevan, dan keyakinan dalam menyampaikan pendapat. Oleh karena itu, pembahasan *Ethos* diarahkan untuk mengidentifikasi bentuk kredibilitas yang ditampilkan setiap tokoh melalui isi dan cara penyampaian pidatonya. Seluruh kutipan pidato dalam bagian ini dirujuk ke Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI terbitan Sekretariat Negara dengan menyebut nama pembicara dan nomor halaman cetak, serta mempertahankan ejaan aslinya.

##### ***Ethos Muhammad Yamin***

Muhammad Yamin membangun kredibilitasnya dengan memposisikan diri sebagai bagian dari bangsa Indonesia secara keseluruhan, bukan sekadar mewakili kepentingan wilayah tertentu. Hal ini terlihat ketika ia menekankan pentingnya mempertimbangkan berbagai wilayah dalam pembahasan dasar negara. “... *pulau Bornéo, Selébes, Maluku, Sunda Ketjil, Malaja dan Sumatera ...*” (Muhammad Yamin, dalam Sekretariat Negara RI, 1959., hlm. 5). Penyebutan berbagai wilayah tersebut menunjukkan bahwa Muhammad Yamin membingkai perumusan dasar negara sebagai persoalan nasional yang membutuhkan perspektif menyeluruh. Kredibilitas tersebut dibangun melalui representasi kolektif, yakni dengan menempatkan kepentingan bersama sebagai landasan pemikiran, bukan hanya kepentingan pribadi atau golongan. Pola serupa dibahas dalam kajian retorika debat politik yang menempatkan kemampuan merepresentasikan kepentingan publik sebagai salah satu unsur pembentukan kredibilitas pembicara (Marzuki et al., 2025). Meskipun demikian, representasi tersebut perlu dipahami sebagai strategi retorik dalam teks, bukan bukti bahwa seluruh kelompok masyarakat Indonesia telah terwakili secara nyata dalam proses perumusan dasar negara. Selain melalui representasi kebangsaan, Muhammad Yamin membangun *Ethos* melalui keluasan pengetahuan tentang pemikiran kenegaraan. Dalam pidatonya, ia menyebut Plato, Aristoteles, dan Thomas More: “*Tidaklah kita hanya bekerdja diatas médja-tulis didalam kamar seorang ahli negara jang bertjita-tjita mengawang. Tidaklah kita bergandéngan dengan fikiran-fikiran Plato dengan Respublica-nja, Aristoteles dengan Politea-nja, Thomas More dengan Utopia-nja*” (Muhammad Yamin, dalam Sekretariat Negara RI, 1959., hlm. 14).

Kutipan ini perlu dibaca secara cermat. Muhammad Yamin menyebut para pemikir tersebut justru untuk menegaskan bahwa susunan negara yang ia usulkan tidak bertolak dari rancangan filsafat yang abstrak, melainkan dari “*barang dan keadaan jang nijata*” (Muhammad Yamin, dalam Sekretariat Negara RI, 1959., hlm. 14). Gerak retorik ini tetap memperlihatkan penguasaan intelektual, sebab Muhammad Yamin menunjukkan bahwa ia mengenal tradisi pemikiran tentang negara sekaligus mampu menjaga jarak darinya. Judul karya ditulis sebagaimana dalam risalah. Kredibilitas intelektual tersebut dilengkapi dengan penekanan Muhammad Yamin pada kenyataan hidup rakyat. Penolakannya terhadap kerja “*diatas médjatulis didalam kamar seorang ahli negara jang bertjita-tjita mengawang*” (Muhammad Yamin, dalam Sekretariat Negara RI, 1959., hlm. 14) menghubungkan pengetahuan teoretis dengan realitas sosial. Jika rujukan kepada Plato, Aristoteles, dan Thomas More menunjukkan keluasan wawasan, penekanan pada kehidupan rakyat menampilkan orientasi praktis dalam pemikiran kenegaraan. Kedua unsur ini membentuk *Ethos* yang saling melengkapi: Muhammad Yamin berusaha tampil sebagai pembicara yang berpengetahuan sekaligus memperhatikan kondisi masyarakat yang akan menjadi bagian dari negara yang dirumuskan.

Tinjauan sistematis Pramudita et al. (2025) mengidentifikasi penggunaan kredibilitas yang diperkuat oleh rujukan pengetahuan atau pengalaman dalam pidato publik yang mereka kaji. Temuan tersebut relevan untuk membaca strategi Muhammad Yamin, terutama dalam penggunaan referensi pemikiran kenegaraan sebagai bagian dari pembentukan kredibilitas intelektual. Sementara itu, penelitian Aditiya et al. (2024) dapat digunakan sebagai pembandingan mengenai pembentukan *Ethos* melalui karakter dan orientasi pembicara terhadap pihak yang direpresentasikannya. Perbandingan ini tidak berarti bahwa strategi Muhammad Yamin identik dengan strategi tokoh kontemporer, melainkan menunjukkan bahwa kredibilitas dapat dibangun melalui unsur yang berbeda sesuai dengan konteks pidatonya. Analisis ini juga perlu mempertimbangkan asal-usul teks. Risalah Sekretariat Negara sendiri mencatat bahwa pidato Muhammad Yamin dikutip dari Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945 jilid pertama tahun 1959 (Sekretariat Negara RI, 1959., hlm. 3), sehingga perbedaan teks tersebut dengan catatan dalam Arsip Pringgodigdo, sebagaimana dibahas oleh Hardinanto (2017) serta Kusuma & Elson (2011), menjadi batasan penting dalam interpretasi. Oleh karena itu, temuan *Ethos* dalam pembahasan ini merujuk pada strategi retorik yang tercermin dalam versi teks yang dianalisis dan tidak secara otomatis memastikan bahwa seluruh ungkapan tersebut disampaikan persis sama dalam pidato lisan pada 29 Mei 1945. *Ethos* Muhammad Yamin dalam teks pidato tersebut tercermin melalui dua strategi utama, yaitu representasi kepentingan nasional yang melampaui batas kedaerahan serta pembentukan kredibilitas intelektual yang

dikaitkan dengan realitas kehidupan rakyat. Keduanya memperlihatkan cara Muhammad Yamin berupaya membangun kepercayaan melalui keluasan perspektif, pengetahuan, dan orientasi kebangsaan yang ditampilkan dalam pidatonya.

### ***Ethos Soepomo***

Dalam pidatonya pada sidang BPUPKI tanggal 31 Mei 1945, Soepomo membangun *Ethos* terutama melalui penguasaan terhadap persoalan ketatanegaraan. Nurita (2018) mengungkapkan, Soepomo memiliki pendirian bahwa yang hendak didirikan adalah negara nasional yang bersatu, yaitu negara yang tidak akan mempersatukan dirinya dengan golongan yang terbesar, tetapi yang akan mengatasi segala golongan dan akan menghormati keistimewaan dari segala golongan, baik golongan yang besar maupun golongan yang kecil. Hal inilah yang disebut dan dikenal dengan paham integralistik sebagai dasar negara. Dalam pembahasannya, Soepomo tidak langsung menyebut tentang paham integralistik sebagai dasar negara, tetapi terlebih dahulu menguraikan berbagai teori mengenai negara. Soepomo menyatakan, “Sebagai tuan-tuan telah mengetahui, dalam ilmu negara kita mendapati beberapa teori, beberapa aliran pikiran tentang negara. Marilah dengan singkat kita meninjau teori-teori negara itu.” (Soepomo, dalam Sekretariat Negara RI, 1959., hlm. 26). Ia kemudian membahas teori individualistis, teori golongan, dan teori integralistik dengan menyebut sejumlah pemikir seperti Thomas Hobbes, John Locke, Jean Jacques Rousseau, Marx, Engels, Lenin, Spinoza, Adam Müller, dan Hegel (Latuheru et al., 2020)

Penggunaan berbagai pemikiran tersebut menunjukkan bahwa Soepomo berusaha membangun kredibilitas melalui pengetahuan dan pemahamannya mengenai teori kenegaraan (Nurita., 2018). Kredibilitas tersebut kemudian diperkuat melalui kemampuannya menghubungkan pemikiran ketatanegaraan dengan kondisi masyarakat Indonesia (Nurita., 2025). Soepomo menyatakan, “Sebagai tuan-tuan telah mengetahui juga, struktur sosial Indonesia jang asli tidak lain ialah tjiptaan kebudajaan Indonesia, ialah buat aliran pikiran atau semangat kebatinan bangsa Indonesia.” (Soepomo, dalam Sekretariat Negara RI, 1959., hlm. 29) Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Soepomo tidak hanya mengandalkan pengetahuan mengenai teori negara, tetapi juga berusaha menunjukkan pemahamannya terhadap struktur sosial dan kebudayaan masyarakat Indonesia. Ia kemudian menghubungkan kondisi tersebut dengan gagasan mengenai persatuan antara rakyat dan pemimpin serta semangat gotong-royong dan kekeluargaan. *Ethos* Soepomo semakin terlihat ketika ia menghubungkan pemahamannya mengenai masyarakat Indonesia dengan gagasan mengenai bentuk negara. Ia menegaskan, “Maka teranglah tuan-tuan jang terhormat, bahwa djika kita hendak mendirikan Negara Indonesia jang sesuai dengan keistimewaan sifat dan tjorak

masjarakat Indonesia, maka negara kita harus berdasar atas aliran pikiran (Staatsidee) negara yang integralistik.” (Soepomo, dalam Sekretariat Negara RI, 1959., hlm. 29) Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa Soepomo menyampaikan gagasan negara integralistik setelah terlebih dahulu menjelaskan teori-teori negara dan kondisi sosial Indonesia (Habibi et al., 2026). Dengan cara tersebut, kredibilitas Soepomo dibangun melalui penguasaan teori ketatanegaraan sekaligus pemahamannya terhadap kondisi sosial Indonesia yang kemudian menjadi dasar bagi penyampaian gagasan negara integralistik.

### ***Ethos Soekarno***

Pidato Soekarno pada 1 Juni 1945 disampaikan sebagai pidato penutup dalam rangkaian sidang pertama BPUPKI, setelah Muhammad Yamin dan Soepomo lebih dahulu menyampaikan gagasan mereka. *Ethos* Soekarno pertama kali tampak dari cara ia memosisikan diri secara santun terhadap forum dan Ketua sidang sebelum menyampaikan gagasannya. Ia menyatakan, “Paduka tuan Ketua yang mulia! Sesudah tiga hari berturut-turut anggota-anggota Dokuritu Zyunbi Tyoosakai mengeluarkan pendapat-pendapatnja, maka sekarang saja mendapat kehormatan dari Paduka tuan Ketua yang mulia untuk mengemukakan pula pendapat saja” (Soekarno, dalam Sekretariat Negara RI, 1959., hlm. 57). Ungkapan tersebut menunjukkan penghormatan terhadap otoritas forum sekaligus kesediaan mengikuti arahan yang telah ditetapkan, sebuah strategi retorik yang lazim digunakan pembicara untuk membangun kesan rendah hati sekaligus tertib sebelum menyampaikan gagasan yang lebih substantif (Pramudita et al., 2025).

Kredibilitas Soekarno selanjutnya dibangun melalui caranya menunjukkan pemahaman yang lebih tepat atas permintaan Ketua sidang dibandingkan pembicara-pembicara sebelumnya. Ia menyatakan, “Banjak anggota telah berpidato, dan dalam pidato meréka itu diutarakan hal-hal yang sebenarnja bukan permintaan Paduka tuan Ketua yang mulia, jaitu bukan dasarnja Indonésia Merdéka. Menurut anggapan saja yang diminta oléh Paduka tuan Ketua yang mulia ialah, dalam bahasa Belanda: ‘Philosofische grondslog’ dari pada Indonésia Merdéka” (Soekarno, dalam Sekretariat Negara RI, 1959., hlm. 57). Pernyataan ini memperlihatkan bahwa Soekarno tidak sekadar menyampaikan gagasan, tetapi terlebih dahulu menegaskan penguasaannya atas inti persoalan yang sedang dibahas sidang, sembari secara implisit membedakan dirinya dari pembicara lain yang dianggapnya belum menjawab persoalan secara tepat. Strategi ini sejalan dengan temuan Wilhelmina (2024) bahwa pidato Soekarno memadukan unsur *Ethos*, *Pathos*, dan *Logos* secara terpadu, salah satunya melalui penegasan posisi pembicara sebagai pihak yang paling memahami arah pembahasan. *Ethos* Soekarno juga terlihat melalui caranya memosisikan diri sebagai juru bicara kesiapan kolektif

bangsa Indonesia untuk merdeka. Ia menyatakan, “Kalau bangsa kita, Indonésia, walaupun dengan bambu runtjing, saudara-saudara, semua siap-sedia mati, mempertahankan tanah air kita Indonésia pada saat itu bangsa Indonésia adalah siap-sedia, masak untuk Merdéka” (Soekarno, dalam Sekretariat Negara RI, 1959., hlm. 60). Kutipan ini secara khusus sebagai bentuk *Ethos* dalam pidato Soekarno, karena pembicara menampilkan dirinya sebagai representasi tekad kolektif rakyat, bukan sekadar menyuarakan pendapat pribadi. Strategi representasi kolektif semacam ini memiliki kemiripan dengan cara Muhammad Yamin membangun kredibilitasnya melalui representasi kepentingan nasional, meskipun Soekarno menekankan aspek kesiapan dan pengorbanan kolektif, sedangkan Muhammad Yamin menekankan keluasan perspektif kewilayahan. Berdasarkan uraian tersebut, *Ethos* Soekarno dalam pidatonya pada 1 Juni 1945 dibangun melalui tiga strategi utama, yaitu penghormatan terhadap otoritas forum sidang, penegasan pemahaman yang lebih tepat atas inti persoalan dibandingkan pembicara sebelumnya, serta representasi dirinya sebagai juru bicara kesiapan kolektif bangsa Indonesia untuk merdeka. Ketiga strategi ini memperlihatkan bahwa kredibilitas Soekarno tidak dibangun melalui klaim otoritas formal semata, melainkan melalui posisinya sebagai penutup rangkaian pembicara yang mampu merangkum dan menegaskan kembali inti persoalan dasar negara di hadapan sidang.

### ***Pathos***

*Pathos* berfokus pada daya tarik emosional untuk memengaruhi audiens. Emosi yang ditimbulkan pembicara dapat memengaruhi penilaian audiens, sebab respons seseorang terhadap suatu pesan dapat berubah ketika dipengaruhi oleh perasaan seperti kegembiraan, kesedihan, kebencian, atau ketakutan. *Pathos* juga berkaitan dengan aspek psikologis yang memengaruhi respons emosional pendengar terhadap makna yang disampaikan dalam pidato (Ardila & Febria, 2025). Dalam pidato, *Pathos* dapat diwujudkan melalui pilihan kata, penggambaran peristiwa, narasi, maupun ungkapan empati yang sesuai dengan topik pembicaraan. Penggunaan *Pathos* bertujuan membangun kedekatan emosional antara pembicara dan audiens sehingga pesan menjadi lebih bermakna dan persuasif. Kedekatan tersebut dapat dibangun melalui ungkapan kepedulian terhadap pihak yang menderita dan bahasa yang membangkitkan respons emosional pendengar (Aditiya et al., 2024), serta melalui narasi emosional yang menumbuhkan simpati, empati, dan keprihatinan (Pramudita et al., 2025). Dengan demikian, *Pathos* memungkinkan pembicara tidak hanya menyampaikan gagasan untuk dipahami secara rasional, tetapi juga membangun keterlibatan emosional yang memengaruhi cara audiens memaknai pesan.

### **Pathos Muhammad Yamin**

*Pathos* Muhammad Yamin terlihat ketika ia menggambarkan penderitaan dan kebangkitan bangsa Indonesia melalui pernyataan, “Bangsa Indonesia mendjelma kembali, setelah menderita perjuang dan berperang” (Muhammad Yamin, dalam Sekretariat Negara RI, 1959., hlm. 22). Ungkapan tersebut menghubungkan kemunculan kembali bangsa Indonesia dengan pengalaman penderitaan dan perjuangan. Kata menderita menghadirkan gambaran kesulitan yang telah dialami, sedangkan frasa menjelma kembali memberikan kesan kebangkitan dan pembaruan. Dalam perspektif *Pathos* Aristoteles, ungkapan ini dapat dipahami sebagai upaya membentuk keadaan emosional audiens melalui penggambaran pengalaman yang menyakitkan sekaligus menghadirkan harapan. Aristoteles menjelaskan bahwa emosi audiens dapat memengaruhi penilaian mereka terhadap suatu persoalan (Aristotle, 2007). Dengan demikian, berdasarkan konsep *Pathos* dan konstruksi makna yang dijelaskan oleh Mannesa & Kuswanjono (2025), penggambaran penderitaan dan kebangkitan berpotensi mendorong audiens memaknai kemerdekaan sebagai sesuatu yang bernilai karena berkaitan dengan pengalaman perjuangan bangsa, bukan sekadar perubahan status politik.

*Pathos* juga terlihat dalam syair penutup pidato Muhammad Yamin, terutama pada penggalan “Kami bersiap segenap ketika, / Dengan darah, djiwa dan raga, / Membéla negara djundjungan tinggi” (Muhammad Yamin, dalam Sekretariat Negara RI, 1959., hlm. 23). Ungkapan darah, jiwa, dan raga menggambarkan kesediaan mengorbankan diri demi membela negara, sedangkan kata ganti kami menghadirkan kesan kolektif sehingga pengorbanan tampil sebagai tanggung jawab bersama. Jika dianalisis melalui konsep *Pathos* Aristoteles, penggambaran pengorbanan tersebut berpotensi membangkitkan keberanian dan keyakinan audiens terhadap perjuangan bersama. Dengan menonjolkan kesediaan berkorban, Muhammad Yamin tidak hanya menyampaikan gagasan tentang pembelaan negara, tetapi juga membangun keterlibatan emosional audiens terhadap cita-cita negara merdeka (Senn et. al., 2025). Selain melalui gambaran penderitaan dan pengorbanan, Muhammad Yamin membangun *Pathos* dengan menyampaikan harapan terhadap kehidupan rakyat setelah negara terbentuk, sebagaimana tampak dalam syair “Kuat dan kokoh selama-lamanja / Melindungi rakjat, makmur selamat, / Hidup bersatu dilaut-didarat” (Muhammad Yamin, dalam Sekretariat Negara RI, 1959., hlm. 23). Kata melindungi memberi kesan keamanan, ungkapan makmur selamat menggambarkan harapan akan kehidupan sejahtera, dan frasa hidup bersatu dilaut-didarat menegaskan cita-cita persatuan yang mencakup daratan dan lautan. Dalam perspektif *Pathos* Aristoteles, penggambaran masa depan yang diharapkan dapat membangkitkan emosi positif, terutama harapan dan keyakinan terhadap kehidupan yang lebih baik. Melalui

gambaran negara yang melindungi dan menyejahterakan rakyat, Muhammad Yamin berpotensi mengarahkan emosi audiens dari ingatan tentang penderitaan menuju harapan akan kehidupan bersama. Penggunaan syair sebagai penutup memperkuat dimensi emosional pidato Muhammad Yamin. Simbol bendera bangsa, pengorbanan, perlindungan rakyat, dan permohonan kepada Tuhan yang hadir dalam syair tersebut berkaitan dengan identitas kebangsaan, perjuangan, dan keyakinan spiritual. Bentuk syair memungkinkan cita-cita negara merdeka disampaikan melalui bahasa yang ekspresif dan imajinatif sehingga terasa lebih dekat secara emosional bagi pendengar. Dengan demikian, syair tersebut bukan sekadar penutup pidato, melainkan bagian dari strategi retorik untuk memperkuat keterlibatan emosional audiens. Dalam konsep *Pathos* Aristoteles, emosi bukan sekadar reaksi terhadap bahasa yang menyentuh perasaan, tetapi juga memengaruhi cara audiens menilai suatu persoalan. Dalam pidato Muhammad Yamin, penderitaan berpotensi memperkuat kesadaran akan arti perjuangan, gambaran pengorbanan menegaskan komitmen terhadap negara, dan harapan akan perlindungan serta kemakmuran memberi orientasi emosional terhadap masa depan. Ketiga strategi tersebut membentuk alur dari pengalaman perjuangan masa lalu menuju kesediaan berkorban dan cita-cita tentang kehidupan bersama yang lebih baik.

### ***Pathos Soepomo***

*Pathos* dalam pidato Soepomo dibangun melalui penyampaian nilai persatuan, hubungan antara pemimpin dan rakyat, serta kehidupan masyarakat yang didasarkan pada kebersamaan. Menurut Rayhan (2024), unsur *Pathos* dapat ditemukan melalui narasi emosional yang berkaitan dengan dampak kemanusiaan. Konsep tersebut dapat digunakan sebagai landasan untuk menganalisis bagaimana pidato Soepomo menghubungkan gagasan negara dengan nilai-nilai yang menyentuh kehidupan masyarakat. Soepomo tidak hanya membahas negara dari sisi struktur pemerintahan, tetapi juga menjelaskan hubungan sosial yang harus terdapat dalam kehidupan bernegara (Habibi et al., 2026). Persatuan antara rakyat dan pemimpin ditempatkan sebagai bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia yang menjadi dasar bagi pembentukan negara. Penyampaian mengenai hubungan tersebut memberikan unsur emosional karena pendengar diarahkan untuk melihat negara sebagai kehidupan bersama yang membutuhkan hubungan erat antarmasyarakat. Hubungan antara pemimpin dan rakyat menjadi salah satu bagian utama dalam pembentukan *Pathos* pada pidato Soepomo. Ia menyatakan bahwa “para pendjabat negara ialah pemimpin jang bersatu-djiwa dengan rakjat” dan “pertalian bathin antara pemimpin dan rakjat seluruhnja senantiasa terpelihara.” (Soepomo, dalam Sekretariat Negara RI, 1959., hlm. 29) Pernyataan tersebut menempatkan hubungan pemimpin dan rakyat sebagai hubungan yang memiliki kedekatan emosional. Istilah bersatu-djiwa

menunjukkan bahwa pemimpin ditempatkan sebagai bagian dari kehidupan rakyat, sedangkan pertalian bathin menunjukkan adanya hubungan yang harus terus dipelihara antara keduanya. Phandino & Riyanto (2026) mengungkapkan bahwa konsep negara integralistik Soepomo memandang negara dan masyarakat sebagai satu kesatuan yang saling mendukung serta menekankan nilai kebersamaan dan kepentingan bersama. Melalui penyampaian tersebut, Soepomo mengarahkan perhatian pendengar pada bentuk hubungan kepemimpinan yang tidak hanya didasarkan pada kewenangan, tetapi juga pada kedekatan dan kesatuan dengan rakyat. Dalam konteks analisis *Pathos*, hubungan tersebut dapat dipahami sebagai upaya membangun gambaran emosional mengenai negara yang mengutamakan persatuan antara pihak yang memimpin dan masyarakat yang dipimpin (Dama et al., 2025). Selain hubungan pemimpin dan rakyat, Soepomo menggunakan nilai gotong royong dan kekeluargaan untuk memperkuat unsur *Pathos* dalam pidatonya. Ia menyatakan bahwa “segala golongan diliputi oleh semangat gotong-rojong, semangat kekeluargaan.” (Soepomo, dalam Sekretariat Negara RI, 1959., hlm. 29) Pernyataan tersebut menghubungkan kehidupan berbagai golongan dalam masyarakat melalui nilai kebersamaan.

Gotong royong menunjukkan adanya kerja bersama, sedangkan kekeluargaan menempatkan hubungan antargolongan dalam suasana kebersamaan dan saling membantu. Nilai gotong royong menjadi bagian dari landasan komunal dalam konsep negara integralistik Indonesia dan berkaitan dengan upaya mewujudkan kebaikan bersama. Hal ini relevan untuk menjelaskan konteks sosial dari pernyataan Soepomo mengenai gotong royong dan kekeluargaan (Phandino & Riyanto, 2026). Soepomo juga menyampaikan nilai cinta kepada tanah air, pengabdian kepada negara, dan ketundukan kepada Tuhan ketika menjelaskan karakter negara yang hendak dibangun. Nilai-nilai tersebut memberikan muatan emosional pada pidatonya karena berkaitan dengan kecintaan, pengabdian, dan rasa memiliki terhadap bangsa (Yolanda et al., 2018). Oleh karena itu, *Pathos* dalam pidato Soepomo dapat dipahami melalui penyampaian nilai persatuan, kedekatan pemimpin dan rakyat, gotong royong, kekeluargaan, cinta tanah air, serta pengabdian kepada negara. Nilai-nilai tersebut menjadi bagian dari cara Soepomo menyampaikan gagasan tentang negara melalui hubungan emosional yang berkaitan dengan kehidupan bersama masyarakat Indonesia.

### ***Pathos* Soekarno**

*Pathos* dalam pidato Soekarno pada 1 Juni 1945 pertama kali tampak melalui caranya membangkitkan emosi audiens dengan perbandingan antarnegara yang telah merdeka. Ia menyatakan, “Lihatlah didalam sedjarah dunia, lihatlah kepada perdjalanannya dunia itu. Banjak sekali negara-negara jang merdêka, tetapi bandingkanlah kemerdekaan negara-negara itu satu

sama lain! Samakah isinja, samakah deradjatnja negara-negara jang merdéka itu? ... Namanja semuanja merdéka, tetapi bandingkanlah isinja!” (Soekarno, dalam Sekretariat Negara RI, 1959., hlm. 58). Mukoyimah (2018) dalam kajiannya terhadap retorika pidato-pidato Soekarno menemukan bahwa gaya bahasanya kerap dibangun melalui konotasi positif-negatif secara bersamaan: sisi negatif digunakan untuk menegaskan dampak buruk suatu kondisi, sedangkan sisi positif ditampilkan dengan nada yang santun dan merendah. Pola semacam ini tampak pada kutipan di atas, ketika Soekarno sekaligus menyiratkan kekhawatiran (kemerdekaan yang mungkin hampa makna) dan harapan (kemerdekaan yang benar-benar berisi), sehingga audiens digiring untuk merefleksikan secara emosional makna kemerdekaan yang sedang diperjuangkan. Daya tarik emosional juga dibangun melalui pengulangan struktur kalimat yang menggambarkan harapan tentang kehidupan rakyat setelah kemerdekaan tercapai.

Soekarno menyatakan, “Didalam Indonésia Merdéka itulah kita memerdekakan rakjat kita! Didalam Indonésia Merdéka itulah kita memerdekakan hatinja bangsa kita! ... Di dalam Indonésia Merdéka itulah kita menjéhatkan rakjat kita .... Didalam Indonésia Merdéka kita melatih pemuda kita agar supaja mendjadi kuat” (Soekarno, dalam Sekretariat Negara RI, 1959., hlm. 61–62). Latupeirissa et al. (2019), dalam investigasi kebahasaan terhadap pidato-pidato penting Soekarno, menemukan bahwa tema perjuangan meraih kemerdekaan dan makna kemerdekaan itu sendiri merupakan gagasan yang berulang kali ditegaskan di berbagai pidatonya. Pengulangan frasa “didalam Indonésia Merdéka itulah” pada kutipan ini sejalan dengan pola tersebut, membentuk irama yang menegaskan harapan secara bertubi-tubi sehingga audiens diajak membayangkan secara konkret wujud kemerdekaan yang dijanjikan, bukan sekadar sebagai konsep abstrak. Puncak daya tarik emosional dalam pidato ini terlihat pada bagian penutup, ketika Soekarno mengajak audiens menghayati semangat gotong royong sebagai jiwa bangsa Indonesia. Ia menyatakan, “Gotong-rojong adalah pembanting-tulang bersama pemerasan-keringat bersama, perdjoangan bantu-binantu bersama. Amal semua buat kepentingan semua, keringat semua buat kebahagiaan semua. Holopis-kuntul-baris buat kepentingan bersama!” (Soekarno, dalam Sekretariat Negara RI, 1959., hlm. 75). Temuan Latupeirissa et al. (2019) bahwa tema persatuan (unity) merupakan gagasan yang paling dominan dan berulang di sepanjang pidato-pidato penting Soekarno turut menjelaskan mengapa seruan gotong royong ini ditempatkan sebagai penutup yang menyimpulkan seluruh gagasan. Penggunaan kata-kata berirama seperti “pembanting-tulang bersama” dan ungkapan khas Jawa “holopis-kuntul-baris” menghadirkan citra kerja keras kolektif yang akrab dan membumi bagi audiens, sehingga gagasan dasar negara tidak hanya disampaikan secara konseptual, tetapi juga dihayati sebagai pengalaman emosional bersama. Berdasarkan uraian

tersebut, *Pathos* dalam pidato Soekarno pada 1 Juni 1945 dibangun melalui tiga strategi utama, yaitu perbandingan bernuansa konotasi positif-negatif yang membangkitkan refleksi emosional tentang makna kemerdekaan, pengulangan harapan tentang kehidupan rakyat setelah merdeka, serta ajakan menghayati semangat persatuan dan gotong royong melalui bahasa yang berirama dan membumi. Ketiga strategi ini konsisten dengan karakter umum retorika Soekarno yang ditemukan dalam kajian-kajian kebahasaan atas pidato-pidatonya, yakni kecenderungan menonjolkan tema persatuan dan perjuangan secara berulang untuk menggerakkan emosi kolektif audiens.

### **Logos**

*Logos* berkaitan dengan penggunaan penalaran rasional dan bukti logis untuk meyakinkan audiens. Berbeda dengan *Ethos* yang bersandar pada kredibilitas pembicara dan *Pathos* yang bersandar pada daya tarik emosional, *Logos* menitikberatkan pada kekuatan argumen itu sendiri, yaitu bagaimana pembicara menyusun fakta, data, sebab-akibat, maupun kerangka berpikir yang sistematis agar gagasan yang disampaikan dapat diterima oleh akal sehat audiens (Pramudita et al., 2025). Dalam pidato politik dan kenegaraan, *Logos* berperan menunjukkan bahwa gagasan yang diajukan dapat dipertanggungjawabkan secara rasional.

### **Logos Muhammad Yamin**

*Logos* dalam pidato Muhammad Yamin terlihat ketika ia menggunakan sejarah bangsa sebagai landasan untuk menjelaskan perlunya negara Indonesia yang merdeka. Dalam ikhtisar pidatonya, Muhammad Yamin mencantumkan pokok “Dasar negara Seriwidjaja dan Madjapahit” dan “Tradisi tatanegara jang putus” (Muhammad Yamin, dalam Sekretariat Negara RI, 1959., hlm. 3). Dalam uraiannya, ia menyatakan bahwa “*dalam 400 tahun ini sedjak runtuhnja keradjaan kedua, tradisi tidak bersambung lagi sampai sekarang*” (Muhammad Yamin, dalam Sekretariat Negara RI, 1959., hlm. 6–7), tetapi tetap menegaskan bahwa “rakjat Indonésia mesti mendapat dasar negara jang berasal dari pada peradaban kebangsaan Indonésia” (Muhammad Yamin, dalam Sekretariat Negara RI, 1959., hlm. 6). Dalam perspektif *Logos* Aristoteles, penggunaan sejarah berfungsi sebagai landasan penalaran, khususnya melalui bentuk contoh (*paradeigma*), yakni preseden historis yang dipakai sebagai bukti penalaran induktif. Muhammad Yamin berupaya menunjukkan bahwa pembentukan negara Indonesia perlu mempertimbangkan identitas dan pengalaman historis bangsa, sehingga argumennya tidak hanya bertumpu pada keinginan untuk merdeka, tetapi juga pada pertimbangan mengenai dasar kebangsaan. Penalaran Muhammad Yamin juga tampak ketika ia menghubungkan tujuan kemerdekaan dengan dasar kemanusiaan dan penolakan terhadap kolonialisme. Ia menyatakan bahwa “tudjuan kemerdekaan sudah sama artinja dengan dasar

kemanusiaan yang berupa dasar kedaulatan rakyat atau kedaulatan negara” (Muhammad Yamin, dalam Sekretariat Negara RI, 1959., hlm. 9), lalu menegaskan bahwa “Negara Rakyat Indonesia menolak segala dasar pendudukan kolonialisme sebagai dasar pembentukan negara” (Muhammad Yamin, dalam Sekretariat Negara RI, 1959., hlm. 15). Rangkaian ini membentuk hubungan sebab-akibat: kemerdekaan dimaknai sebagai kedaulatan, dan kedaulatan menuntut penolakan terhadap dasar penjajahan. Pola penalaran sebab-akibat semacam ini juga ditemukan dalam kajian retorika pidato kenegaraan kontemporer sebagai salah satu bentuk *Logos* yang paling umum dipakai untuk membangun legitimasi atas suatu klaim politik (Sutrisno & Wiendijarti, 2015). Jika dianalisis melalui *Logos* Aristoteles, hubungan tersebut menjadi dasar argumentasi Muhammad Yamin dalam menjelaskan mengapa kemerdekaan diperlukan. Ia tidak hanya mengemukakan tuntutan kemerdekaan, tetapi juga memberikan alasan prinsipil yang melatarbelakanginya.

Aspek *Logos* selanjutnya terlihat dalam argumentasi Muhammad Yamin mengenai kemanusiaan universal sebagai dasar kemerdekaan. Ia menyatakan, “Kedaulatan rakyat Indonesia dan Indonesia Merdeka adalah berdasar peri-kemanusiaan yang universeel berisi humanisme dan internasionalisme bagi segala bangsa” (Muhammad Yamin, dalam Sekretariat Negara RI, 1959., hlm. 10). Kutipan tersebut memperlihatkan struktur argumen yang terdiri atas premis dan kesimpulan. Premis umumnya menyatakan bahwa peri-kemanusiaan bersifat universal dan berlaku bagi segala bangsa. Dari premis itu ditarik kesimpulan bahwa kedaulatan rakyat dan kemerdekaan Indonesia berdiri di atas dasar tersebut. Struktur semacam ini sejalan dengan bentuk *enthymem* yang disebutkan Aristoteles sebagai salah satu cara efektif *Logos* memengaruhi pendengar, yakni penalaran yang bertumpu pada premis umum yang sudah diterima bersama oleh audiens. Muhammad Yamin menggunakan prinsip umum tentang kemanusiaan untuk memberi dasar bagi tuntutan kemerdekaan Indonesia, sehingga gagasannya tidak hanya disampaikan sebagai aspirasi nasional, tetapi juga dijelaskan melalui alasan yang lebih luas. Dalam perspektif *Logos* Aristoteles, penyusunan gagasan secara sistematis membantu audiens memahami cakupan persoalan yang sedang dibicarakan. Namun, sistematika tersebut perlu dipahami sebagai bentuk pengorganisasian argumen, bukan dengan sendirinya sebagai bukti bahwa semua bagian pidato menggunakan penalaran deduktif. Unsur *Logos* terutama terlihat dari usaha Muhammad Yamin menguraikan persoalan negara melalui beberapa dasar pemikiran yang saling melengkapi. Dalam kerangka retorika Aristoteles, *Logos* berperan melalui argumen yang membantu audiens memahami dasar pemikiran pembicara, sedangkan penerimaan terhadap argumen tersebut tetap bergantung pada bagaimana alasan-alasan itu dipahami dan dinilai oleh audiens.

### **Logos Soepomo**

Dalam pidatonya pada sidang BPUPKI tanggal 31 Mei 1945, Soepomo menggunakan *Logos* melalui pola penalaran yang disusun secara bertahap. Hal ini terlihat ketika ia memulai pembahasan dengan menjelaskan persyaratan formal pembentukan negara, kemudian beralih pada persoalan dasar negara yang sesuai bagi Indonesia. Soepomo menyatakan bahwa keberadaan wilayah, rakyat, dan pemerintah yang berdaulat belum menjawab persoalan pembentukan negara dari sudut pandang sosiologis dan politis (Soepomo, dalam Sekretariat Negara RI, 1959., hlm. 25–26). Susunan penjelasan tersebut memperlihatkan penggunaan penalaran bertahap, yaitu memulai pembahasan dari persyaratan dasar, mengidentifikasi persoalan yang belum terjawab, lalu mengarahkan pembahasan pada kebutuhan untuk menentukan dasar negara. Dengan pola tersebut, Soepomo membangun alur pemikiran yang menghubungkan persoalan awal dengan pembahasan berikutnya.

Penggunaan *Logos* juga terlihat melalui teknik perbandingan ketika Soepomo menjelaskan teori individualistik, teori golongan, dan teori integralistik (Soepomo, dalam Sekretariat Negara RI, 1959., hlm. 26–27). Ia menguraikan ketiga teori tersebut untuk memperlihatkan perbedaan pandangan mengenai hubungan antara negara dan masyarakat (Habibi et al., 2026). Teknik perbandingan ini membantu pendengar memahami bahwa setiap teori memiliki prinsip yang berbeda dalam memandang kedudukan individu, golongan, dan negara. Soepomo kemudian menggunakan perbedaan tersebut sebagai dasar untuk membahas konsep negara yang hendak diterapkan di Indonesia. Dalam konteks *Logos*, fungsi perbandingan bukan sekadar menyebutkan beberapa teori, melainkan menyusun pilihan berdasarkan perbedaan prinsip yang terkandung di dalamnya (Suwigno, 2020). Selain perbandingan, Soepomo menggunakan penalaran yang menghubungkan suatu prinsip dengan penerapannya dalam konteks tertentu. Ia menjelaskan bahwa susunan negara berkaitan dengan sejarah hukum dan struktur sosial masyarakatnya. Ia juga menyatakan bahwa susunan yang sesuai bagi satu negara belum tentu sesuai bagi negara lain (Soepomo, dalam Sekretariat Negara RI, 1959., hlm. 27). Pernyataan tersebut memperlihatkan pola penalaran yang menempatkan kondisi suatu masyarakat sebagai pertimbangan dalam menentukan susunan negaranya. Soepomo menerapkan pertimbangan tersebut pada Indonesia untuk menjelaskan mengapa penentuan dasar negara perlu memperhatikan struktur sosial masyarakat Indonesia (Phandino & Riyanto, 2026). Dengan demikian, hubungan antara prinsip umum dan konteks penerapannya menjadi salah satu cara Soepomo menyusun penalaran dalam pidatonya. *Logos* dalam pidato Soepomo selanjutnya terlihat melalui penggunaan contoh konkret untuk

memperjelas gagasan yang bersifat abstrak. Ketika membahas kepala desa, ia menjelaskan perlunya memahami rasa keadilan dan kehendak masyarakat serta melakukan musyawarah bersama mereka (Soepomo, dalam Sekretariat Negara RI, 1959., hlm. 29). Contoh tersebut memberikan gambaran mengenai penerapan prinsip kepemimpinan dalam kehidupan masyarakat. Melalui contoh yang dekat dengan konteks sosial Indonesia, Soepomo menghubungkan gagasan mengenai penyelenggaraan negara dengan praktik pengambilan keputusan di lingkungan masyarakat. Dalam analisis *Logos*, penggunaan contoh ini berfungsi sebagai penjelas yang membantu pendengar memahami bagaimana suatu prinsip dapat diterapkan, bukan semata-mata sebagai penyampaian nilai kebersamaan (Suwignyo, 2020). Teknik penalaran lain terlihat ketika Soepomo membahas kemungkinan konsekuensi dari penetapan negara berdasarkan identitas agama kelompok mayoritas.

Ia menghubungkan pilihan dasar negara dengan persoalan kedudukan kelompok agama lain dalam kehidupan bernegara. Hubungan antara pilihan dan konsekuensi tersebut menunjukkan penggunaan penalaran yang mempertimbangkan dampak dari suatu keputusan sebelum menentukan bentuk negara yang diusulkan. Soepomo menggunakan pertimbangan itu untuk menjelaskan pandangannya mengenai negara nasional yang tidak mengidentikkan negara dengan satu golongan agama (Soepomo, dalam Sekretariat Negara RI, 1959., hlm. 31–33). Dalam bagian ini, *Logos* tampak melalui cara Soepomo mengemukakan suatu kemungkinan, menjelaskan persoalan yang dapat timbul dari pilihan tersebut, kemudian menghubungkannya dengan gagasan yang ia ajukan (Habibi et al., 2026). Berdasarkan uraian tersebut, *Logos* dalam pidato Soepomo dapat diidentifikasi melalui beberapa teknik penalaran, yaitu penyusunan pembahasan secara bertahap, perbandingan antarteori, penghubungan prinsip dengan konteks penerapannya, penggunaan contoh konkret, dan pertimbangan terhadap konsekuensi suatu pilihan. Teknik-teknik tersebut menunjukkan cara Soepomo menyusun dan menjelaskan pemikirannya agar hubungan antara persoalan, alasan, dan kesimpulan dapat diikuti oleh pendengar. Fokus *Logos* dengan demikian terletak pada cara Soepomo menalar dan menyusun penjelasan, bukan pada kredibilitas dirinya sebagai pembicara ataupun nilai emosional yang terkandung dalam pidatonya.

### ***Logos* Soekarno**

*Logos* dalam pidato Soekarno pertama-tama terlihat melalui cara ia menyusun argumen tentang definisi bangsa dengan membandingkan dua teori sekaligus menambahkan unsur baru. Ia mengutip pandangan Ernest Renan dan Otto Bauer, lalu menyatakan keduanya belum cukup karena hanya memperhatikan manusianya dan melupakan tempat, dengan menegaskan “Orang dan tempat tidak dapat dipisahkan!” (Soekarno, dalam Sekretariat Negara RI, 1959., hlm. 65–

66). Pola ini memperlihatkan penalaran sintesis: dua premis teoretis dibandingkan, kekurangan masing-masing diidentifikasi, kemudian disimpulkan prinsip baru berupa konsep geopolitik sebagai dasar kebangsaan. Soekarno tidak sekadar mengutip otoritas keilmuan, tetapi mengolahnya menjadi argumen yang disesuaikan dengan konteks Indonesia (Mannesa & Kuswanjono, 2025). Penalaran induktif berikutnya tampak melalui penggunaan contoh-contoh daerah untuk membangun prinsip persatuan. Soekarno menyebut Minangkabau, Yogyakarta, dan Pasundan sebagai kelompok yang masing-masing merasa satu keluarga, namun menegaskan masing-masing “hanja satu bahagian ketjil dari pada satu kesatuan” (Soekarno, dalam Sekretariat Negara RI, 1959., hlm. 67).

Dengan merangkai tiga contoh konkret menuju satu kesimpulan umum, ia menyusun argumen yang bertumpu pada logika dan penataan fakta sebagai dasar argumentasi (Huri, 2023). Teknik ini membantu audiens menangkap gagasan abstrak tentang kebangsaan melalui realitas kedaerahan yang mereka kenal langsung. *Logos* Soekarno juga terwujud lewat analogi yang menopang argumennya tentang kemerdekaan. Ia menyebut kemerdekaan sebagai “djembatan emas” (Soekarno, dalam Sekretariat Negara RI, 1959., hlm. 58–59), sebuah metafora yang menempatkan kemerdekaan politik bukan sebagai tujuan akhir, melainkan sarana logis menuju perbaikan yang lebih luas. Argumen ini sekaligus menjawab pandangan yang menuntut syarat kesehatan dan kesejahteraan dipenuhi lebih dulu sebelum merdeka, lewat anekdot tentang Ibn Saud yang tetap merdeka walau rakyatnya belum mengenal bahan bakar modern (Soekarno, dalam Sekretariat Negara RI, 1959., hlm. 58). Dengan menghubungkan premis bahwa kemerdekaan adalah syarat untuk membangun, bukan hasil dari pembangunan, Soekarno menyusun penalaran sebab-akibat yang membalik logika lawan bicaranya. Teknik penalaran terakhir terlihat pada proses reduksi gagasan dari Pancasila menjadi Trisila lalu Ekasila. Pernyataan “Pantjasila mendjadi Tri Sila, Tri Sila mendjadi Eka Sila” (Soekarno, dalam Sekretariat Negara RI, 1959., hlm. 75) menunjukkan upaya menyederhanakan lima prinsip menjadi satu inti bersama, yaitu gotong royong, yang kemudian dibedakan secara definitif dari konsep kekeluargaan: satu bersifat statis, satu lagi dinamis (Soekarno, dalam Sekretariat Negara RI, 1959., hlm. 75). Perbandingan konseptual semacam ini merupakan bentuk *Logos* yang menyusun argumen lewat klasifikasi dan pembedaan istilah, sehingga audiens diajak memahami bukan hanya apa yang diusulkan, tetapi juga mengapa istilah itu dipilih dibanding alternatif yang tersedia. Berdasarkan uraian tersebut, *Logos* dalam pidato Soekarno dapat diidentifikasi melalui empat teknik penalaran, yaitu sintesis dua teori menjadi prinsip baru, penalaran induktif lewat contoh kedaerahan, penggunaan analogi sebagai dasar argumen, dan reduksi-klasifikasi gagasan. Keempat teknik tersebut menunjukkan bahwa

kekuatan argumentatif pidato Soekarno tidak hanya terletak pada daya emosional atau kredibilitas dirinya, tetapi juga pada susunan logis yang membimbing audiens dari premis menuju kesimpulan yang ia tuju.

### Perbandingan Strategi Persuasi Ketiga Tokoh

Hasil analisis *Ethos*, *Pathos*, dan *Logos* di atas dirangkum pada Tabel 1 untuk memperlihatkan persamaan dan perbedaan strategi persuasi Muhammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno.

**Tabel 1.** Sintesis perbandingan *Ethos*, *Pathos*, dan *Logos* dalam pidato Muhammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno.

| Unsur         | Tokoh          | Strategi utama                                                                                  | Kutipan representatif                                                                                             | Interpretasi                                                                                                              |
|---------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Ethos</i>  | Muhammad Yamin | Representasi kebangsaan lintas wilayah; rujukan pemikir negara; orientasi pada kehidupan rakyat | “...pulau Bornéo, Selébes, Maluku, Sunda Ketjil, Malaja dan Sumatera ...”                                         | Kredibilitas dibangun lewat keluasan perspektif dan pengetahuan; dibaca sebagai strategi dalam versi teks yang dianalisis |
|               | Soepomo        | Penguasaan teori ketatanegaraan; pemahaman struktur sosial Indonesia                            | “Marilah dengan singkat kita meninjau teori-teori negara itu.”                                                    | Teori dipaparkan lebih dahulu sebelum negara integralistik diusulkan, sehingga usulan tampak berdasar                     |
|               | Soekarno       | Penghormatan pada forum; klaim pemahaman inti persoalan; juru bicara kesiapan kolektif          | “... jang diminta oleh Paduka tuan Ketua jang mulia ialah ... Filosofische-grondslag daripada Indonesia Merdeka.” | Kredibilitas dibangun lewat posisi terhadap forum dan pembicara sebelumnya, bukan klaim otoritas formal                   |
| <i>Pathos</i> | Muhammad Yamin | Penderitaan, pengorbanan, harapan; syair penutup                                                | “Bangsa Indonesia mendjelma kembali, setelah menderita perjuang dan berperang”                                    | Alur emosi dari pengalaman masa lalu menuju cita-cita bersama; syair memperkuat keterlibatan emosional                    |
|               | Soepomo        | Persatuan pemimpin dan rakyat; gotong royong dan kekeluargaan                                   | “para pendjabat negara ialah pemimpin jang bersatu-djiwa dengan rakjat”                                           | Kedekatan emosional dibangun lewat nilai kebersamaan dan hubungan batin                                                   |
|               | Soekarno       | Perbandingan berkonotasi positif-negatif; pengulangan harapan; seruan gotong royong berirama    | “Di dalam Indonesia Merdeka itulah kita memerdekakan rakjat kita!”                                                | Pengulangan struktur kalimat dan ungkapan berirama membuat harapan terasa konkret dan kolektif                            |
| <i>Logos</i>  | Muhammad Yamin | Preseden sejarah; sebab-akibat kolonialisme; premis hak kemerdekaan                             | “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa ...”                                                  | Tuntutan merdeka dijustifikasi dengan sejarah, kausalitas, dan prinsip umum (entimem)                                     |
|               | Soepomo        | Penalaran bertahap; perbandingan teori; contoh konkret; pertimbangan konsekuensi                | Uraian tiga teori negara (individualistik, golongan, integralistik); parafrase, tanpa kutipan tunggal             | Pilihan negara integralistik disusun lewat perbandingan prinsip dan konsekuensinya                                        |
|               | Soekarno       | Sintesis dua teori; induksi dari contoh daerah; analogi; reduksi konsep                         | “Pancasila menjadi Trisila, Trisila menjadi Eka Sila”                                                             | Argumen bergerak dari premis teoretis dan contoh menuju prinsip yang disederhanakan                                       |

Sumber: analisis berdasarkan Sekretariat Negara RI (1959).

Persamaan pertama terletak pada *Ethos*: ketiga tokoh membangun kredibilitas dengan menghubungkan pengetahuan atau posisinya dengan kondisi bangsa Indonesia. Muhammad Yamin merujuk pada keragaman wilayah, Soepomo pada struktur sosial Indonesia, dan Soekarno pada kesiapan kolektif bangsa untuk merdeka. Pola ini sejalan dengan pandangan Aristoteles bahwa kepercayaan audiens dibentuk oleh kesan yang muncul dari pidato itu sendiri (Aristotle, 2007) dan dengan temuan Pramudita et al. (2025) tentang kredibilitas yang diperkuat rujukan pengetahuan atau pengalaman. Persamaan kedua terletak pada *Pathos*, yang pada ketiganya dikaitkan dengan tema persatuan, baik melalui kebangkitan dan pengorbanan (Muhammad Yamin), kekeluargaan dan gotong royong (Soepomo), maupun repetisi dan seruan gotong royong (Soekarno). Persamaan ketiga terletak pada *Logos*, yakni penalaran dari premis menuju kesimpulan tentang dasar negara. Karena sidang tersebut menentukan arah negara di masa depan, ketiga pidato dapat dibaca sebagai retorika deliberatif, sebagaimana juga diidentifikasi dalam analisis pidato kenegaraan oleh Fahrudin et al. (2022).

Perbedaan tampak pada unsur yang paling menonjol. Muhammad Yamin cenderung bertumpu pada *Pathos* dan *Logos* historis: ia menyusun alur dari penderitaan, kebangkitan, dan pengorbanan menuju harapan, menutupnya dengan syair, serta menggunakan sejarah Sriwijaya dan Majapahit sebagai preseden. Soepomo cenderung bertumpu pada *Logos*: perbandingan teori individualistis, golongan, dan integralistik mendahului usulan negara integralistik, sehingga muatan emosionalnya melekat pada konsep kekeluargaan, bukan pada seruan langsung kepada pendengar. Soekarno cenderung memadukan ketiganya: posisi sebagai pembicara penutup dan penegasan inti persoalan (*Ethos*), repetisi dan seruan kolektif (*Pathos*), serta sintesis, induksi, analogi, dan reduksi konsep (*Logos*) saling menopang dalam satu rangkaian. Dalam teks yang dianalisis, keseimbangan ketiga unsur yang menurut Aristoteles menopang persuasi tampak paling jelas pada Soekarno, sedangkan Muhammad Yamin dan Soepomo menunjukkan penekanan yang lebih terarah pada *Pathos*-historis dan *Logos*-teoretis.

**Tabel 2.** Perbandingan *Ethos*, *Pathos*, dan *Logos* pada ketiga tokoh.

| Unsur                  | Muhammad Yamin                                                               | Soepomo                                                                  | Soekarno                                                                   |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <i>Ethos</i>           | Representasi kebangsaan lintas wilayah; wawasan kenegaraan dibingkai praktis | Penguasaan teori negara; pemahaman struktur sosial Indonesia             | Hormat pada forum; penegasan inti persoalan; juru bicara kesiapan kolektif |
| <i>Pathos</i>          | Penderitaan, kebangkitan, pengorbanan, harapan; syair penutup                | Persatuan pemimpin dan rakyat; kekeluargaan dan gotong royong            | Repetisi harapan; seruan gotong royong yang berirama                       |
| <i>Logos</i>           | Preseden sejarah; premis kemanusiaan universal; hubungan sebab-akibat        | Perbandingan teori; pertimbangan konteks dan konsekuensi; contoh konkret | Sintesis teori; induksi; analogi; reduksi konsep                           |
| Kecenderungan menonjol | <i>Pathos</i> dan <i>Logos</i> historis                                      | <i>Logos</i> teoretis-sistematis                                         | Perpaduan ketiga unsur                                                     |

Sumber: analisis berdasarkan Sekretariat Negara RI (1959).

Temuan ini melengkapi penelitian terdahulu. Aditiya et al. (2024) dan Ardila & Febria (2025) menunjukkan bahwa ketiga unsur dapat ditemukan bersamaan dalam satu pidato, penelitian ini memperlihatkan bahwa dalam pidato pendirian negara komposisinya berbeda antartokoh, dan *Logos* lebih banyak bertumpu pada teori, sejarah, dan analogi daripada fakta statistik. Pada Soekarno, temuan ini selaras dengan kajian kebahasaan Latupeirissa et al. (2019) yang menempatkan persatuan sebagai tema dominan dalam pidato-pidatonya. Secara teoretis, perbandingan ini menegaskan bahwa kerangka Aristoteles dapat dipakai untuk membaca pidato historis sebagai pilihan strategi yang berbeda antartokoh dalam forum yang sama. Perbandingan tersebut tetap dibatasi oleh teks yang dianalisis teks pidato Muhammad Yamin bersumber dari Naskah Persiapan Undang Undang 1945, (1959) (Hardinanto, 2017).

**Tabel 3.** Perbandingan Teks Risalah Sekretariat Negara dan Catatan Arsip BPIP-ANRI.

| Aspek Perbandingan                   | Risalah Setneg                                                                                                                              | Arsip BPIP-ANRI                                                                                                    | Implikasi terhadap Penelitian                                                                                                             |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kedudukan sumber                     | Digunakan sebagai sumber utama analisis <i>Ethos</i> , <i>Pathos</i> , dan <i>Logos</i> dalam pidato Muhammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno. | Digunakan sebagai sumber pembanding untuk memeriksa kesesuaian teks pidato dengan catatan arsip.                   | Kedua sumber memiliki fungsi berbeda sehingga sumber utama analisis tetap jelas.                                                          |
| Redaksi pidato Muhammad Yamin        | Pada halaman 5, tertulis “pulau Bornéo, Selébes, Maluku, Sunda Ketjil, Malaja dan Sumatera”.                                                | Pada halaman 70, catatan arsip Pringgogidgo menuliskan “Borneo, Selebes, Maluku, Malaya, Sumatra dan Sunda Kecil”. | Terdapat perbedaan ejaan dan urutan penyebutan wilayah yang perlu diperhatikan dalam penggunaan sumber.                                   |
| Kesesuaian teks                      | Menyajikan teks pidato yang menjadi dasar analisis retorika dalam penelitian.                                                               | Menyajikan catatan arsip yang dapat digunakan untuk memeriksa kesesuaian teks risalah dengan dokumen arsip.        | Perbandingan diperlukan agar penafsiran tidak mengabaikan perbedaan antara versi teks yang digunakan.                                     |
| Perbedaan substansi pidato           | Menjadi dasar untuk mengidentifikasi gagasan, daya tarik emosional, kredibilitas pembicara, dan argumentasi dalam pidato.                   | Menyediakan bahan arsip untuk memeriksa apakah perbedaan teks juga menyangkut isi atau gagasan pidato.             | Perbedaan substansi perlu disimpulkan setelah membandingkan bagian teks yang bersesuaian, bukan hanya berdasarkan perbedaan ejaan.        |
| Implikasi terhadap analisis retorika | Unsur <i>Ethos</i> , <i>Pathos</i> , dan <i>Logos</i> diidentifikasi berdasarkan redaksi dalam teks utama.                                  | Digunakan untuk memberikan konteks dan menguji kehati-hatian interpretasi terhadap teks utama.                     | Hasil analisis perlu dikaitkan dengan versi teks yang benar-benar digunakan dan tidak otomatis dianggap terkonfirmasi oleh catatan arsip. |
| Penggunaan sumber dalam penelitian   | Dipertahankan sebagai sumber utama agar konsisten dengan kutipan dan nomor halaman yang digunakan dalam analisis.                           | Dicantumkan sebagai sumber pembanding untuk kritik sumber.                                                         | Penelitian dapat mempertahankan konsistensi analisis sekaligus menunjukkan perhatian terhadap ketepatan sumber sejarah.                   |

Sumber: Risalah Sidang BPUPKI-PPKI, 1959, hlm. 5; Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Arsip Nasional Republik Indonesia (2024), hlm. 70.

Berdasarkan Tabel 3, risalah yang digunakan dalam penelitian dan dokumen arsip BPIP-ANRI memiliki fungsi yang berbeda. Risalah Sekretariat Negara tetap menjadi sumber utama untuk menganalisis unsur *Ethos*, *Pathos*, dan *Logos* dalam pidato Muhammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno. Sementara itu, dokumen BPIP-ANRI digunakan sebagai sumber perbandingan untuk memeriksa kesesuaian teks pidato dengan catatan arsip yang tersedia. Perbedaan dapat dilihat pada penyebutan wilayah Indonesia dalam pidato Muhammad Yamin. Risalah Setneg menggunakan redaksi “pulau Bornéo, Selébes, Maluku, Sunda Ketjil, Malaja dan Sumatera”, sedangkan catatan arsip Pringgodigdo yang dimuat dalam buku BPIP-ANRI menuliskan “Borneo, Selebes, Maluku, Malaya, Sumatra dan Sunda Kecil”. Perbedaan tersebut menunjukkan adanya perubahan ejaan dan urutan penyebutan wilayah. Namun, contoh ini belum cukup untuk menyimpulkan bahwa keseluruhan isi kedua dokumen berbeda secara substansial. Perbandingan tersebut penting karena ketepatan teks dapat memengaruhi cara peneliti memahami dan menafsirkan isi pidato. Analisis retorika perlu didasarkan pada redaksi yang benar-benar tercantum dalam sumber utama, sedangkan catatan arsip digunakan untuk membantu memeriksa kesesuaian teks dan membatasi kesimpulan yang dibuat. Oleh karena itu, penggunaan dokumen BPIP-ANRI tidak dimaksudkan untuk menggantikan risalah Setneg, melainkan untuk memperkuat kehati-hatian dalam menganalisis pidato para tokoh dalam sidang BPUPKI.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Muhammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno menggunakan strategi retorika yang berbeda dalam menyampaikan gagasan mengenai dasar negara pada sidang pertama BPUPKI tahun 1945. Muhammad Yamin membangun *Ethos* melalui representasi kebangsaan dan pengetahuan intelektual, *Pathos* melalui gambaran penderitaan, pengorbanan, dan harapan, serta *Logos* melalui penalaran historis dan argumentasi mengenai hak kemerdekaan. Soepomo menekankan *Ethos* melalui penguasaan teori ketatanegaraan dan pemahaman terhadap kondisi sosial Indonesia, *Pathos* melalui nilai persatuan, kekeluargaan, dan gotong royong, serta *Logos* melalui perbandingan teori, penalaran sistematis, dan pertimbangan konsekuensi. Sementara itu, Soekarno memadukan *Ethos* melalui penghormatan terhadap forum dan representasi kolektif, *Pathos* melalui pengulangan emosional dan seruan persatuan, serta *Logos* melalui sintesis teori, penalaran induktif, analogi, dan penyederhanaan konsep. Temuan ini memperlihatkan bahwa ketiga unsur retorika dapat

digunakan dengan penekanan yang berbeda sesuai dengan cara setiap tokoh membangun dan menyampaikan argumentasinya. Penelitian ini terbatas pada analisis teks pidato dan sumber dokumenter yang digunakan, sehingga hasilnya menjelaskan strategi retorika yang tercermin dalam teks, bukan secara langsung mengukur respons audiens pada saat pidato disampaikan. Selain itu, perbedaan versi sumber historis, khususnya teks pidato Muhammad Yamin, perlu diperhatikan dalam menafsirkan kutipan dan temuan penelitian. Penelitian selanjutnya disarankan membandingkan berbagai versi arsip pidato serta mengkaji penggunaan retorika dalam pidato tokoh atau periode sejarah lainnya. Kajian lanjutan juga dapat menghubungkan analisis retorika dengan konteks sosial-politik dan penerimaan audiens agar pemahaman mengenai persuasi dalam komunikasi politik menjadi lebih menyeluruh.

## DAFTAR REFERENSI

- Aditiya, D. A., Hidayah, E. L., Aliya, I. N., & Hindun. (2024). Ethos, pathos, logos dalam pidato Menlu di sidang DK PBB terkait konflik Palestina-Israel. *Jurnal Kata (Pendidikan Bahasa, Sastra, dan Pembelajarannya)*, 12(1), 82–90.
- Ardila, D., & Febria, R. (2025). Analisis penggunaan etos, pathos, logos dalam pidato Dedi Mulyadi di upacara Hari Kebangkitan Nasional "Bangkit Bersama Wujudkan Indonesia Kuat." *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Sastra, Bahasa, dan Pendidikan*, 4(3), 202–211. <https://doi.org/10.25299/s.2025.23968>
- Aristotle. (2007). *On rhetoric: A theory of civic discourse* (G. A. Kennedy, Trans.; 2nd ed.).
- Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. (2024). *Naskah sumber arsip dasar negara I: Masa sidang pertama Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) 29 Mei s.d. 1 Juni 1945*. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.
- Dama, Y., Monoarfa, F., Djalilu, Y., Abdullah, F. A., Hino, K., & Mokoagow, S. (2025). Analisis retorika pidato Prabowo Subianto pada pelantikan presiden tahun 2024–2029 (Kajian teori retorika Aristoteles). *Jurnal Bahasa, Sastra, dan Budaya*, 15(1), 100–111.
- Fahrudin, A., Bajuri, D., & Billah, S. A. (2022). Analisis retorika pidato Presiden Jokowi di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada kanal YouTube Official iNews. *JIKA (Jurnal Ilmu Komunikasi Andalan)*, 5(2), 200–215.
- Habibi, S. S., Aprodhita, F. Y., Apriyani, Y., Ulinnuha, M. Z., & Saputra, D. A. (2026). Negara integralistik dan konsep Manunggaling Kawula Gusti: Analisis pemikiran Soepomo dalam perumusan dasar negara. *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD FKIP Universitas Mandiri*, 12(2).
- Hardinanto, A. (2017). Autentisitas sumber sejarah Pancasila dalam masa sidang pertama Badan untuk Menyelidiki Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan tanggal 29 Mei–1 Juni 1945. *Veritas et Justitia*, 3(1), 43–64. <https://doi.org/10.25123/vej.2524>
- Hasanah, U., & Budianto, A. (2020). Pemikiran Soekarno dalam perumusan Pancasila. *Candi: Jurnal Pendidikan dan Penelitian Sejarah*, 20(2), 31–54.
- Huri, V. S. (2023). Etos, patos, logos sebagai elemen dasar retorika. *Prophetica: Scientific and Research Journal of Islamic Communication and Broadcasting*, 7(2), 81–90.

- Kusuma, A. B., & Elson, R. E. (2011). A note on the sources for the 1945 constitutional debates in Indonesia. *Bijdragen Tot de Taal-, Land- en Volkenkunde*, 167(2–3), 196–209. <https://doi.org/10.1163/22134379-90003589>
- Latuheru, A. C., Lattu, I. Y., & Tampake, T. R. (2020). Pancasila sebagai teks dialog lintas agama dalam perspektif Hans-Georg Gadamer dan Hans Kung. *Jurnal Filsafat*, 30(2), 150. <https://doi.org/10.22146/jf.49193>
- Latupeirissa, D. S., Laksana, I. K. D., Artawa, K., & Sosiowati, I. G. A. (2019). Lingual investigation of President Soekarno speech: A report. *E-Journal of Linguistics*, 13(2), 281–289. <https://doi.org/10.24843/e-JL.2019.v13.i02.p07>
- Mannesa, M. N. H. I., & Kuswanjono, A. (2025). Constructing meaning: The role of Aristotelian ethos, pathos, and logos through a neurosemantic lens. *Jurnal Filsafat*, 35(1). <https://doi.org/10.22146/jf.102028>
- Marzuki, Hadad, A., & Ratulangi, D. (2025). Retorika dan teknik debat politik. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 2(4), 560–574.
- Mekarisce, A. A. (2020). Teknik pemeriksaan keabsahan data pada penelitian kualitatif di bidang kesehatan masyarakat. *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*, 12(3). <https://doi.org/10.52022/jikm.v12i3.102>
- Mukoyimah. (2018). *Retorika dalam pidato Soekarno pada demokrasi terpimpin: Analisis dakwah* [Tesis magister, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang].
- Nasruji, N. (2018). Peranan pemerintah meningkatkan manajemen mutu pendidikan Kota Batam. *Historia: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah*, 3(1), 33–47. <https://doi.org/10.33373/j-his.v3i1.1683>
- Nurita, R., & Sugiarto, L. (2018). Pandangan negara integralistik sebagai dasar *philosophische grondslag* negara Indonesia. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 9(1), 59–67. <https://doi.org/10.26905/idjch.v9i1.1986>
- Phandino, T. D., & Riyanto, A. (2026). Integralistik Indonesia dan tantangan identitas nasional dalam dialog dengan pemikiran Rousseau. *Integralistik*, 37(1), 80–92.
- Pramudita, D. V., Hutapea, A. E. M., & Irwansyah. (2025). A systematic literature review: Ethos, pathos, logos dalam komunikasi publik pidato. *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, 8(2), 209–227. <https://doi.org/10.31539/kaganga.v8i2.13849>
- Rayhan, M. (2024). Analisis retorika Aristoteles pidato Retno Marsudi pada sidang darurat istimewa ke-10 Majelis Umum PBB. *Indonesian Journal of Applied Linguistics Review*, 5(1), 24–34.
- Savira, L., & Sitinjak, D. R. (2024). Analisis retorika pada pidato Surya Paloh di HUT ke-13 Partai Nasdem. *Sosfilkom: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Program Studi Sastra Melayu*, 18(2), 181–192. <https://doi.org/10.32534/jsfk.v18i2.6808>
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. (1959). *Himpunan risalah sidang-sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang berhubungan dengan penyusunan Undang-Undang Dasar 1945*. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Senn, M., Schwaderer, C., Hayek, L., & Dingler, S. C. (2025). Mapping rhetorical styles in political crisis communication. *Policy Studies*, 1–21. <https://doi.org/10.1080/01442872.2025.2546385>

- Sitasari, N. W. (2022). Mengenal analisa konten dan analisa tematik dalam penelitian kualitatif. In *Forum Ilmiah*, 19(1), 77–84.
- Sugiyono, S. (2022). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sujoko, A., Saintio, F. A., & Wahyudi, D. (2021). Identitas keindonesiaan dalam pidato Soekarno pada 1 Juni 1945. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 19(2), 188–204. <https://doi.org/10.31315/jik.v19i2.4609>
- Sutrisno, I., & Wiendijarti, I. (2015). Kajian retorika untuk pengembangan pengetahuan dan ketrampilan berpidato. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 12(1), 70–84.
- Suwignyo, A. (2020). Rekayasa bahasa dan konstruksi politik "persatuan-kesatuan" dalam wacana "Negara Kesatuan Republik Indonesia." *Jurnal Kawistara*, 10(1), 116–132. <https://doi.org/10.22146/kawistara.48974>
- Wilhelmina, D. E. (2024). Analisis teori retorika Aristoteles pada pidato Soekarno dalam mempersuasi masyarakat. *Jurnal Ilmu Komunikasi Efek*, 7(1). <https://doi.org/10.32534/jike.v7i1.3040>
- Yolanda, Y., Widayati, E. S., & Husniah, F. (2018). Nilai karakter bangsa dalam Serat Bratayuda saduran Karel Fredrik Winter. *Jurnal Retorika*, 11(1), 88–99. <https://doi.org/10.26858/retorika.v11i1.4959>
- Yuliani, W. (2018). Metode penelitian deskriptif kualitatif dalam perspektif bimbingan dan konseling. *Quanta*, 2(2), 83–91. <https://doi.org/10.22460/q.v1i1p1-10.497>